



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2011-2012**

SENIN, 14 MEI 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2011-2012**

SENIN, 14 MEI 2012

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Hari ini, 14 Mei 2012, Dewan memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 13 Juli 2012, meliputi 42 hari kerja. Dalam Masa Persidangan IV ini, Dewan akan melaksanakan 3 (tiga) fungsi konstitusionalnya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk fungsi anggaran, sebagaimana mekanisme dan prosedur dalam Peraturan Tata Tertib DPR, sudah akan dilakukan pembahasan RAPBN 2013, pada tataran Pembicaraan Pendahuluan.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun Sidang 2011 – 2012, ijinilah Pimpinan atas nama Anggota Dewan menyampaikan Duka Cita yang mendalam serta keprihatian sehubungan dengan terjadinya tragedi kecelakaan pesawat penumpang Sukhoi Super Jet 100 (SSJ 100) buatan Rusia minggu lalu yang menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat di daerah Gunung Salak, Bogor. Semoga keluarga para korban tabah menghadapi musibah ini dan semoga arwah para korban diterima di sisi-Nya. Tragedi ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi

dunia penerbangan kita. Kepada seluruh Tim evakuasi, prajurit TNI, Relawan dan semua pihak, kami sampaikan penghargaan luar biasa atas langkah-langkah yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan dalam rangka evakuasi kemanusiaan seluruh korban kecelakaan pesawat Sukhoi. Untuk itu, saya mengajak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat untuk sejenak mengheningkan cipta ditujukan kepada para korban.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Tahun 2012, DPR masih akan menjalani 3 (tiga) kali masa persidangan, yaitu Masa Persidangan IV yang dimulai hari ini sampai 13 Juli. Kemudian, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, yang akan dibuka dengan agenda Pengantar RAPBN 2013 oleh Presiden, dimulai tanggal 16 Agustus dan diperkirakan ditutup pada pertengahan Oktober. Fokus Masa Sidang I adalah pembahasan dan penyelesaian RUU APBN 2013. Selanjutnya, Masa Persidangan II 2012-2013 akan berjalan awal Nopember sampai dengan minggu ketiga Desember.

Dengan agenda tersebut, berarti pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan harus dioptimalkan, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi yang masih memprihatinkan. Kita telah menyetujui prioritas RUU untuk tahun 2012 sejumlah 64 (enam puluh empat) RUU. Namun, baru 2 (dua) RUU Prioritas yang diselesaikan.

Dengan melihat kedepan di Tahun 2013, diperkirakan, agenda kegiatan untuk penanganan fungsi legislasi akan berjalan sampai dengan Masa Persidangan III dan IV (sampai dengan pertengahan Juli 2013), karena untuk Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014, akan dititikberatkan kepada pembahasan anggaran, baik mengenai pembahasan RUU-APBN maupun RUU APBN-Perubahan. Sedangkan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 perpolitikan ditanah airakan diwarnai kegiatan kampanye menghadapi Pemilu 2014. Dipastikan para anggota Dewan yang akan mengambil bagian dalam Pemilu Legislatif 2014 tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan kedewanan.

Oleh karena itu, Pimpinan Dewan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Alat Kelengkapan Dewan, baik Komisi, Panitia Khusus maupun Badan Legislasi, untuk benar-benar fokus menangani fungsi legislasi. Sebagaimana pernah saya sampaikan, tahun 2012 adalah tahun yang sangat ideal apabila kita berkehendak memacu pelaksanaan fungsi ini. Kita harus mempunyai tekad dan semangat untuk mendekati target prioritas yang telah ditetapkan.

Kita sangat paham bahwa, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan fungsi ini tidak semata-mata dihadapi DPR seperti rapat-rapat yang berjalan bersamaan waktu dan sulitnya mempertemukan kata sepakat terhadap beberapa materi tertentu, tetapi Pemerintah pun menghadapi masalah yang sama antara lain perlunya pemantapan koordinasi dan konsolidasi internal Pemerintah. Termasuk harus menyiapkan 14 (empatbelas) RUU yang telah menjadi prioritas yang harus disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Pimpinan Dewan, selain memberikan dorongan bagi penyelesaiannya, juga bersiap untuk membantu Alat Kelengkapan Dewan, manakala dalam pembahasan RUU menemui kendala berkaitan dengan sulitnya mendapatkan titik-temu dalam substansi-substansi strategis. Berbagai terobosan dan langkah-langkah akan dilakukan, baik melalui konsultasi antar-fraksi maupun konsultasi dengan Presiden.

Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, kami angkat kembali beberapa hal terkait dengan proses pembahasan RUU, yaitu:

Pertama, ada 2 (dua) RUU yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja di Komisi X, menjelang pengambilan keputusan di tingkat Komisi (pembicaraan tingkat I) ditunda, karena Pemerintah meminta waktu untuk memantapkan koordinasinya di kalangan internal mereka. Pemerintah memandang perlu untuk menyelaraskan RUU tentang Pendidikan Tinggi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau peraturan *lex-spesialis* yang telah ada saat ini, dalam rangka mengharmonisasikan pendidikan tinggi ke dalam kesatuan sistem yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan rujukan UU ini. Demikian pula dengan RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang juga telah disetujui untuk ditunda. Kedua RUU ini dipastikan selesai pada Masa Sidang IV.

Kedua, ada 7 (tujuh) RUU yang telah lama dibahas, bahkan telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan melalui keputusan Rapat Paripurna, yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

Ketiga, ada 7 (tujuh) RUU yang telah dan segera akan dibahas pada masa sidang sekarang ini dan berlanjut pada masa sidang yang akan datang. Antara lain; RUU tentang Organisasi Massa, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Pangan, RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan.

Keempat, RUU yang sudah diputuskan penanganannya oleh Dewan, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang

Desa serta RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Kelima, ada 6 (enam) RUU yang telah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR, menunggu Surat Presiden untuk penunjukan Menteri yang akan menanganinya bersama DPR.

Keenam, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang baru saja kita terima dari Presiden, kita yakini memerlukan prioritas penanganan karena sangat penting bagi dunia ekonomi.

Ketujuh, ada 23 (duapuluh tiga) RUU yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi dan Komisi-Komisi Dewan dalam bentuk Naskah Akademik yang apabila selesai maka segera menjadi RUU inisiatif DPR. Selain itu, ada 14 (empatbelas) RUU yang disiapkan oleh Pemerintah.

Delapan, 19 (sembilanbelas) RUU Pemekaran Daerah, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan 18 (delapanbelas) RUU pembentukan Kabupaten/Kota.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, RUU tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah diselesaikan oleh Dewan pada Masa Persidangan III, telah menuai *resistensi* dari partai-partai kecil non-parlemen, yaitu dengan mengajukan permohonan uji materi atas RUU ini ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materiil berkenaan dengan ketentuan mengenai verifikasi partai peserta Pemilu dan ambang batas parlemen (*parliamentary treshold*) 3,5% yang berlaku nasional.

Sudah tentu Dewan perlu mempersiapkan diri dengan membentuk Tim Kuasa Hukum yang akan mewakili kepentingan DPR dan memberikan tanggapan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan di dalam RUU tersebut. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Dewan harus mempertahankannya, karena substansi yang diujimaterikan telah dibahas sangat intensif oleh Panitia Khusus maupun oleh Fraksi-fraksi. Namun demikian, persiapan Pemilu 2014 tidak boleh surut dengan adanya proses ini.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam menjalankan fungsi anggaran, selain memantau pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 oleh Komisi-Komisi DPR, maka untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Dewan sudah menjadwalkan pembahasan tentang Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2013 pada Masa Persidangan IV. Hal ini merupakan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Tata-Tertib DPR Pasal 152. Dewan mengagendakan Rapat Paripurna Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 pada tanggal 16 Mei, dan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna berikutnya, baik berkaitan dengan pandangan umum fraksi maupun tanggapan Pemerintah. Agenda berikutnya dalam Pembicaraan Pendahuluan ini, disesuaikan dengan mekanisme APBN yang telah berjalan selama ini. Proses akhir dari Pembicaraan Pendahuluan RAPBN adalah laporan Badan Anggaran DPR-RI kepada rapat Paripurna Dewan yang akan disampaikan pada minggu terakhir bulan Juni 2012.

Pimpinan mengingatkan bahwa pembahasan dalam tataran Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 harus benar-benar dilakukan dengan penuh ketelitian dengan mengedepankan profesionalitas dalam menentukan kebijakan anggaran negara, karena hasil Pembicaraan Pendahuluan akan menjadi dasar Pemerintah untuk menyusun besaran APBN 2013 yang akan disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2012 yang akan datang. Dalam kaitan ini Badan Anggaran akan membentuk 4 (empat) Panitia Kerja agar pembahasannya lebih efisien dan efektif. Kepada Komisi VII, diminta untuk melakukan pembahasan dengan mitra kerjanya berkaitan dengan asumsi harga minyak mentah dan *lifting* minyak, kepada Komisi XI juga, diminta melakukan pembahasan bersama Pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, nilai tukar dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN).

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berlarut-larutnya permasalahan BBM sangat berkaitan dengan masalah postur APBN 2012 yang sedang berjalan. Para Anggota Dewan diharapkan terus melakukan pemantauan terkait dengan semakin membesarnya jumlah anggaran subsidi BBM. Langkah yang tepat adalah dilakukannya penghematan dan pengendalian BBM bersubsidi, mengingat subsidi BBM dalam APBN telah disepakati bersama Pemerintah.

Pimpinan Dewan mengharapkan, dalam Masa Persidangan IV ini, para Anggota Dewan hendaknya lebih pro-aktif menemukan kebijakan dan menggali ide-ide bersama Pemerintah, guna mencari solusi dalam mempertahankan besaran APBN-Perubahan2012 yang telah disepakati, agar ekonomi nasional tetap terjaga dan APBN tetap sehat dan aman. Untuk membahas dan menetapkan solusi yang tepat dan terukur, Dewan berharap dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan serta rencana aksi, dan kemudian dapat segera diimplementasikan agar ada kepastian di masyarakat.

Dewan dapat memahami permasalahan yang berkembang antara kebutuhan menutup defisit dalam APBN dan potensi penerimaan negara dengan harga BBM tetap, seperti yang berlaku dan tidak mengalami kenaikan. Pimpinan Dewan khawatir, bila kondisi tersebut dibiarkan, dimana subsidi BBM dan listrik meningkat tanpa pengendalian, maka defisit APBN bisa menembus 3,5% diatas angka yang telah ditetapkan dan ini bertentangan dengan undang-undang.

Dewan menyadari, tidak banyak opsi yang tersedia dalam memecahkan permasalahan selama ini dan terlalu banyak energi yang dikeluarkan dalam pembahasan. Pemerintah harus bekerja lebih keras mencari, mengolah dan memilih *opsi* yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dewan menanggapi positif solusi yang disampaikan Kepala Negara, yakni *Pertama*, kita harus melakukan pengurangan secara signifikan penggunaan volume BBM bersubsidi. *Kedua*, meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara. *Ketiga*, semua jajaran pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga negara, juga harus melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran di wilayahnya masing-masing. Dewan berpendapat bahwa ketiga solusi tersebut sangat mungkin dilakukan sesegera mungkin dengan memberikan tauladan kepada publik, dimulai dari para pejabat negara yang duduk di lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif.

Demikian pula dalam sisi penghematan, Pimpinan Dewan menghimbau agar penghematan dan efisiensi pengeluaran APBN dilakukan dengan skala prioritas terhadap program dan kegiatan. Dewan juga harus berperan aktif menjelaskan kepada rakyat yang diwakilinya, agar masyarakat memahami situasi yang dihadapi oleh negara dan pemerintahnya. Sehingga solusi tersebut benar-benar bisa menjadi solusi yang terbaik bagi seluruh komponen negara, bagi rakyat, bagi ekonomi, dengan komitmen yang kuat untuk dilaksanakan secara bersama.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR akan melanjutkan tugas Tim Pengawas Century yang prosesnya masih berlangsung sampai saat ini. Pimpinan Dewan mengharapkan kerjasama dari aparat penegak hukum, secara khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja lebih intensif menindaklanjuti hasil rapat Tim Pengawas Century pada Masa Persidangan III yang lalu. Pimpinan Dewan juga mengharapkan agar hasil yang lebih konkret dari Tim Pengawas Century agar ada kepastian hukum bagi setiap pihak.

Dewan dalam hal ini BAKN DPR diharapkan fokus kepada ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011 yang telah disampaikan BPK RI kepada DPR. BAKN harus melakukan telaahan dan hasilnya disampaikan kepada Komisi-Komisi untuk ditindaklanjuti, sebagai bentuk pengawasan Dewan terhadap pengelolaan APBN. Pengawasan ini diharapkan dilakukan dengan lebih efektif agar kedepan pengelolaan keuangan negara makin transparan, akuntabel dan kualitas pemeriksaan juga akan semakin baik.

Konflik pertanahan, perkebunan dan pertambangan di berbagai daerah, masih saja terjadi. Masyarakat menganggap kasus-kasus yang terjadi dan memakan korban terkait sengketa tanah adalah dikarenakan adanya "penindasan" antara pemilik modal yang kuat dengan warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Banyaknya kasus tanah yang tidak juga terselesaikan membuat Komisi II memutuskan untuk membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria. Pertimbangan lainnya adalah rekomendasi Panitia Kerja Sengketa dan Konflik Pertanahan tak pernah dituntaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tim ini akan melibatkan sejumlah Komisi. Pelibatan beberapa komisi ini karena tidak sedikit sengketa atau konflik pertanahan yang berkaitan dengan aparat keamanan, Kementerian Kehutanan, Pertambangan, Pemerintahan Daerah, dan juga pihak swasta. Tim ini diharapkan dapat mendorong pemerintah menuntaskan persoalan sengketa lahan dan konflik agraria.

Upaya ini merupakan ruh semangat Dewan untuk membela kepentingan rakyat dalam masalah sengketa pertanahan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Tentunya hasil kerja Tim Khusus Pertanahan ini dapat menghasilkan solusi yang efektif, dimana setelah melakukan tugasnya, Tim akan menyampaikan rekomendasi kepada Paripurna DPR dan selanjutnya kepada Presiden dalam rangka menuntaskan masalah-masalah pertanahan yang ada di tanah air.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Beberapa masalah juga mengundang perhatian pimpinan dan anggota Dewan, diantaranya masalah tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses peradilan. Sudah banyak putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi disisi lain masih saja terjadi tindak pidana korupsi. Dewan tidak dapat mencampuri urusan yudikatif, apapun putusan peradilan harus kita hormati. Kita mengetahui bahwa saat ini badan peradilan termasuk bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Disisi lain putusan pengadilan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Masyarakat terusik dengan putusan badan peradilan yang belum memberikan hukuman atau vonis yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pandangan masyarakat terhadap ketidakadilan atas putusan badan peradilan yang tidak maksimal, membuat sebagian orang merasa apatis dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi.

Masalah lain yang juga mendapatkan perhatian kalangan Dewan adalah masalah Otonomi Daerah. DPR menghargai dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh peringatan Wakil Presiden dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-16 tanggal 25 April 2012 yang lalu, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah masih tumpang-tindih antara keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya oleh semua pihak.

Dewan juga berpandangan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah selama ini masih mengalami keadaan dimana banyak hal yang belum jelas koridornya antara pengelolaan di pusat dan daerah. Kita memang harus jujur untuk mengakui hal itu. Dewan sependapat bahwa sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan Otonomi Daerah, antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, DPR mengajak Pemerintah untuk bekerja sama menjabarkan lebih lanjut kewenangan Pusat dan Daerah, serta tanggungjawabnya secara jelas, terutama mengenai kewenangan yang mengatur publik, dana, pendidikan, kesehatan dan personalia. Dewan sependapat bahwa perlu penerapan "*reward and punishment*" terhadap setiap institusi atau daerah yang dinilai berhasil atau gagal dalam melaksanakan pemerintahannya. Dewan perlu lebih memberi perhatian dan memantau secara serius dalam masalah kebutuhan mendasar tersebut.

Dalam kaitan dengan masalah otonomi daerah, kalangan Dewan sangat menyesalkan terjadinya pembakaran terhadap kantor Pemerintah Kabupaten Mesuji oleh

massa pendukung wakil bupati yang diberhentikan. Ini adalah tindakan anarkhis yang tidak boleh dibiarkan dan perlu diambil tindakan hukum yang tegas agar kedepan tidak terjadi lagi tindakan-tindakan melawan hukum semacam itu.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 tinggal hitungan bulan lagi. Ada 6 (enam) pasang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, bahkan salah satu diantaranya adalah Yang Terhormat Dr. H. Hidayat Nur Wahid anggota Fraksi PKS, Ketua BKSAP. Seperti kita ketahui bersama, ke-enam pasang bakal calon tersebut memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin Ibukota Jakarta. Oleh sebab itu, DPR mengharapkan Pemilukada dapat berjalan dengan aman, tertib, langsung umum bebas dan rahasia (Luber), agar dapat menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan Pemilukada di daerah lainnya. Kesuksesan Pemilukada DKI akan menjadi barometer bagi Pemilukada di daerah lain. Kedepan, perlu ada pengaturan di dalam UU Pemilukada tentang persyaratan calon yang masih menjabat sebagai kepala daerah di wilayah lain. Terutama dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat pemilih di daerahnya.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Hari buruh 1 Mei yang baru lalu telah di peringati oleh seluruh buruh di berbagai kota di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Peringatan yang sempat mengundang kekhawatiran masyarakat akan terjadi tindak anarkhis, ternyata tidak terbukti. Alhamdulillah aksi buruh berjalan dengan tertib dan damai. Perjuangan para buruh yang disuarakan melalui pimpinan organisasi mereka, sangat patut kita dengar, kita perhatikan dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah. Isu yang diusung sejauh ini tidak beranjak dari tuntutan dipenuhinya hak hak normatif mereka seperti perbaikan upah, kesejahteraan, jaminan sosial, kesehatan dan perlindungan. Membaiknya jaminan berserikat dan konsolidasi pergerakan buruh, di harapkan akan berhasil membawa perubahan termasuk reformasi sistem pengupahan dan jaminan sosial.

Demikian pula dengan buruh migran. Buruh migran saat ini berada dalam posisi yang rentan, bekerja di negara lain yang sering tidak memperoleh perlindungan yang layak. Kita baru saja menyelesaikan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. RUU

ini harus segera menjadi UU karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan pekerja migran. Yang terakhir adalah kasus penembakan tiga orang TKI asal Nusa Tenggara Barat oleh Polisi Diraja Malaysia, yang sangat menyentuh nurani kita. Dewan meminta agar kasus ini ditindak lanjuti segera melalui investigasi secara tuntas dan melalui jalur diplomatik, agar kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan konvensi ini dalam rangka mendorong penerapan prinsip-prinsip serta norma standar Internasional bagi perlindungan hak buruh seluruh pekerja migran dan keluarganya. Salah satu pasal dalam konvensi ini menegaskan bahwa "*tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya yang dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam yang tidak manusiawi yang merendahkan martabat pekerja migran*". Dalam konvensi ini juga diatur *bahwa pekerja migran dan keluarganya harus memiliki hak untuk meminta perlindungan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara tersebut*, sehingga semua negara harus meratifikasi konvensi dan mematuhi.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Masalah sosial lain yang mendapat perhatian Dewan adalah upaya penanganan terhadap beberapa bencana alam yang telah terjadi di tanah air. Terkait dengan penanganan korban bencana Lumpur Sidoarjo, Dewan mendesak agar Lapindo segera menuntaskan masalah ganti-rugi terhadap penduduk yang menjadi korban, sehinggamasalah ini tidak berlarut-larut dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial ekonomi daerah, bahkan dapat meluas menjadi skala nasional. Dewan meminta Pemerintah untuk mengoptimalisasikan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Terhadap kejadian bencana gempa bumidi Propinsi Aceh baru-baru ini, kita amat menaruh perhatian, karena ternyata perangkat *early warning system* tidak berfungsi pada saat terjadigempa bumi. Hal ini patut menjadi perhatian bagi Pemerintah setempat, karena perangkat ini akan meminimalisir jatuhnya korban bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami. Demikian pula dengan musibah banjir yang terjadi di wilayah Aceh Tenggara, membutuhkan penanganan secara cepat dan memadai, terutama yang terkait dengan kebutuhan bahan pangan dan sanitasi.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan siswa, melainkan juga ketaqwaan dan akhlak mulia. Oleh karena itu, Dewan perlu mengingatkan kembali Pemerintah terkait adanya materi pembelajaran dan buku-buku pelajaran kepada anak didik yang menyimpang dari norma agama, sosial, dan budaya bangsa. Pemerintah melalui kementerian terkait dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu mencermati kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan atau dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Penyelenggaraan Ujian Nasional yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu juga menjadi salah satu fokus perhatian Dewan. Harus diakui bahwa persiapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Ujian Nasional pada tahun ini relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, masih juga ditemui berbagai permasalahan, baik yang bersifat substantif maupun teknis, seperti kebocoran soal, tertukarnya soal dan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

Ujian Nasional hendaknya tidak hanya bertujuan untuk menilai standar ketrampilan akademik, namun juga menjadi evaluasi bagi sikap positif yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata ketika peserta didik keluar dari institusi sekolah. Untuk itu kita perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menegaskan bahwa standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena itu lembaga pendidikan hendaknya tidak hanya mengasah sumberdaya manusia berpengetahuan, melainkan juga berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan kiprah DPR RI di bidang diplomasi parlemen, perlu kami sampaikan bahwa saat ini DPR tengah dalam persiapan sebagai tuan rumah pelaksanaan Sidang *Executive Committee Meeting (Excom)*AIPA dan Sidang *AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) To Combat The Drug Menace* ke-9 yang akan berlangsung pada tanggal 8-12 Juli 2012 di Yogyakarta. Melalui Sidang EXCOM, akan ditentukan topik dan

agenda di bidang politik, ekonomi, sosial maupun yang berkaitan dengan keorganisasian AIPA, dan akan dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-33 yang direncanakan akan berlangsung tanggal 16-22 September 2012 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sidang AIFOCOM juga memiliki nilai yang tidak kalah penting bagi kepentingan nasional Indonesia. Sidang AIFOCOM dilaksanakan khusus untuk membahas upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam memberantas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Melalui Sidang AIFOCOM, Delegasi Indonesia diharapkan dapat memperjuangkan resolusi-resolusi yang mampu membantu ASEAN dalam memberantas peredaran narkoba yang cenderung meningkat. Indonesia sangat berkepentingan dengan pemberantasan Narkoba mengingat status Indonesia saat ini dalam keadaan darurat Narkoba. Dewan berharap, segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga sidang tersebut dapat berlangsung lancar dan sukses, serta berguna bagi kepentingan nasional dan bermanfaat bagi kemajuan kawasan Asia Tenggara.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Melihat pada perkembangan yang berlangsung di kawasan saat ini, terdapat satu perubahan penting yang patut kita cermati, yaitu proses transisi menuju demokrasi yang tengah berlangsung di Myanmar. Saat ini masyarakat internasional tengah menyaksikan perkembangan yang menggembirakan berkaitan dengan proses demokratisasi di Myanmar, dimana Pemilu legislatif yang diikuti oleh seluruh elemen politik dalam masyarakat telah berhasil dilaksanakan secara demokratis, serta berjalan lancar dan aman. Terlepas dari masih adanya kekurangan dalam proses demokratisasi negara tersebut, kita patut memberi apresiasi atas perkembangan demokrasi yang terjadi, dan berharap hal ini terus berjalan secara positif sesuai dengan harapan masyarakat Myanmar dan internasional

Pencabutan sanksi-sanksi di bidang ekonomi yang pernah dijatuhkan masyarakat internasional terhadap Myanmar, perlu dicabut, sebagaimana yang diusulkan para pemimpin ASEAN dalam pertemuan KTT ASEAN di Kamboja baru baru ini. Setiap kemajuan yang dicapai Myanmar akan turut berkontribusi terhadap kemajuan secara keseluruhan untuk wilayah regional ASEAN.

Masih terkait dengan perkembangan politik di kawasan, Dewan juga menyambut positif telah dilaksanakannya Pemilihan Presiden Timor Leste secara aman dan damai, dan mengucapkan selamat atas terpilihnya Taur Matan Ruak sebagai presiden yang baru.

Dewan berharap, kepemimpinan Presiden Taur Matan Ruak dapat membawa kemajuan bagi rakyat Timor Leste dan hubungan bilateral kedua negara.

Disamping perkembangan positif yang terjadi di ASEAN, kita masih menyaksikan keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di kawasan lain, seperti persoalan sengketa Laut Cina Selatan dan situasi di Semenanjung Korea yang belum juga kondusif. Bagi Indonesia, penyelesaian damai atas kasus Laut Cina Selatan, sangat berarti demi menjaga stabilitas keamanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk Semenanjung Korea, kita mengharapkan agar kedua Korea dapat duduk kembali dalam meja perundingan, untuk menyelesaikan persoalannya dengan baik.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebagai bagian dari kegiatan diplomasi parlemen, pada Masa Persidangan IV ini, Dewan akan menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Presiden Portugal, Ketua Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, dan Ketua Parlemen Thailand. Kita berharap, kunjungan tersebut dapat meningkatkan persahabatan kedua negara dan kedua bangsa.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 ini kami sampaikan. Kiranya kita dapat memanfaatkan waktu pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 ini dengan sebaik-baiknya.

Kepada para anggota, Pimpinan mengingatkan kembali bahwa kita telah memiliki Kode Etik yang baru, yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam kita bersikap, berperilaku, melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk senantiasa menjalankan segala amanah yang diberikan kepada kita sebagai wakil rakyat. Amin. Selamat Bekerja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Mei 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN PIDATO PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2011—2012

PENANGANAN RUU TAHUN 2012

| NO. | PENGELOMPOKKAN | RUU |
|------------|---|---|
| I. | 2 RUU Prioritas yang sudah selesai dibahas. | <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Penanganan Konflik Sosial2. RUU Perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. |
| II. | 4 RUU Kumulatif Terbuka selesai dibahas. | <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana (Pemerintah).2. RUU tentang Pengesahan <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i> (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme).3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.4. RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. |
| III. | 2 RUU yang dipastikan selesai pada Masa Persidangan IV karena tertunda dalam pengambilan keputusan. | <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Pendidikan Tinggi2. RUU tentang Pendidikan Kedokteran |
| IV. | 7 RUU yang telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan oleh Keputusan Rapat Paripurna DPR | <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Aparatur Sipil Negara2. RUU tentang Koperasi3. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro4. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah5. RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta6. RUU tentang Sistem peradilan Pidana Anak7. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar |
| V. | 7 RUU yang telah mulai dibahas pada pembicaraan tingkat I dan akan berlanjut pembahasannya | <ol style="list-style-type: none">1. RUU tentang Organisasi Massa2. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani3. RUU tentang Pangan4. RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan (nama semula adalah RUU tentang Pengembangan |

| | | |
|-------|---|--|
| | | <p>dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan).</p> <p>5. RUU tentang Jaminan Produk Halal</p> <p>6. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p> <p>7. RUU tentang Keamanan Nasional</p> |
| VI. | RUU yang baru saja diterima dari Presiden dan menjadi prioritas. | 1. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) |
| VII. | 2 RUU yang sudah diputuskan penaganannya oleh Panitia khusus | <p>1. RUU tentang Pemerintah Daerah dan RUU tentang Desa (ditangani oleh 1 Pansus)</p> <p>2. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme</p> |
| VIII. | 6 RUU yang sudah dikirim kepada Presiden, menunggu surat Presiden tentang penunjukkan Menteri | <p>1. RUU Perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (surat sudah diterima DPR).</p> <p>2. RUU tentang Jalan</p> <p>3. RUU Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p> <p>4. RUU tentang Mahkamah Agung</p> <p>5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI</p> <p>6. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.</p> |
| IX. | 19 RUU Pemekaran Daerah | <p>1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>2. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>3. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>4. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>5. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>6. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>7. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara.</p> <p>8. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.</p> <p>9. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Barat di Provinsi Lampung.</p> <p>10. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>11. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>12. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>13. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>14. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>15. RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>16. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>17. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>18. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.</p> <p>19. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.</p> |
|--|--|--|

PENANGANAN NON RUU

1. Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Kelanjutan kegiatan Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Kasus Bank Century;
3. Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria;
4. Penetapan Pejabat-pejabat Publik:
 - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
 - Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), melengkapi calon-calon yang sudah terpilih;
 - Rekomendasi terhadap pencalonan duta-duta besar negara sahabat untuk Indonesia ;